



# LAPORAN KINERJA INSPEKTORAT BPKP S.D TRIWULAN I TAHUN 2023

OT.04/LPP-79/IN/4/2023

*Tanggal 14 April 2023*



- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR





**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120  
Telp. (021) 85910031 (Hunting) Fax. (021) 85910147

Nomor : OT.04/LPP-79/IN/4/2023  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Laporan Kinerja Inspektorat BPKP  
s.d Triwulan I Tahun 2023

14 April 2023

Yth. Kepala Biro MKOT  
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat BPKP s.d. Triwulan I Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

**A. Pencapaian Outcome Triwulan I Tahun 2023**

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat BPKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 terlihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d TW I	Capaian (%)	
			2023	s.d TW I		Thd target 2023	Thd target TW I
<b>I</b>	<b>Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal</b>						
1.1	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	70	-	-	-	-
<b>II</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP</b>						
2.1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100	-	-	-	-
<b>III</b>	<b>Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP</b>						
3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat</b>						
4.1	Skor Kapabilitas APIP	Skor	4	-	-	-	-
<b>V</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan</b>						
5.1	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100	-	100,00	100,00	-
<b>VI</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan</b>						
6.1	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	-	-	-	-
<b>VII</b>	<b>Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara</b>						
7.1	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu	Persen	100	-	100,00	100,00	-



No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target		Realisasi s.d TW I	Capaian (%)	
			2023	s.d TW I		Thd target 2023	Thd target TW I
	(LHPKN/SPT)						
<b>VIII</b>	<b>Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP</b>						
8.1	Indeks IEPK BPKP	Level	3	-	-	-	-
<b>IX</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat</b>						
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	-	-	-	-
9.2	Skor IKPA unit kerja	Skor Skala 100	95	-	100,00	105,26	-
9.3	Persentase BMN dalam kondisi Baik	Persen	80	-	49,21	61,51	-
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	-	-	-	-
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	-	-	-	-
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	-	-	-	-

Kinerja Inspektorat BPKP sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1 : “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal”

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil *assurance*. Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

#### 1.1 Persentase Tindak Lanjut Atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance

IKK persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil *assurance* diukur dengan rumus pengukuran indikator sebagai berikut:

Jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan s.d. Triwulan I 2023 dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan s.d Triwulan I 2023. Target kinerja tahun 2023 sebesar 70,00%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil *assurance*.

### 2. Sasaran Kegiatan 2: “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP”

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh



pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Yang Ditindaklanjuti**

IKK persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran indikator sebagai berikut:

Jumlah saran/rekomendasi sesuai Berita Acara yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah rekomendasi sesuai Berita Acara pada tahun sebelumnya, dikalikan 100%. Target kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Sampai dengan Triwulan I 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti.

### **3. Sasaran kegiatan 3 : “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengeolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

#### **3.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Unit Kerja yang Ditindaklanjuti**

IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Jumlah atensi/rekomendasi hasil pengawasan terkait penyelenggaraan pengelolaan risiko tahun berjalan (triwulan IV tahun sebelumnya s.d Triwulan I tahun berjalan) yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dibagi jumlah atensi/rekomendasi hasil penawasan terkait penyelenggaraan pengelolaan risiko tahun berjalan (Triwulan IV tahun sebelumnya s.d Triwulan I tahun berjalan), dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 35%.



Sampai dengan Triwulan I 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti.

#### **4. Sasaran Kegiatan 4: “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

##### **4.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan WBK/WBBM**

IKK persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM diukur dengan rumus perhitungan indikator sebagai berikut:

Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM (Triwulan IV tahun sebelumnya s.d Triwulan III Tahun berjalan) dibagi jumlah kuota unit kerja yang ditetapkan Menpan pada periode Tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 75,00%.

Sampai dengan Triwulan I 2023 belum terdapat target atas IKK persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM.

#### **5. Sasaran Kegiatan 5: “Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase ASN yang melaporkan harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/SPT). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), disampaikan bahwa kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan **tidak berlaku**. LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.



Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **5.1 Persentase ASN yang melaporkan Harta Kekayaan secara Tepat Waktu (LHPKN/SPT Tahunan)**

IKK persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/SPT Tahunan) diukur dari jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan pada aplikasi e-LHKPN dan pelaporan SPT Tahunan dengan jumlah wajib lapor tahun berjalan dikali 100%.

Target tahun 2023 sebesar 100,00%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target atas indikator kinerja ini. Namun, realisasi kinerja s.d triwulan I tahun 2023 sebesar 100%, diperoleh dari sebanyak 5.453 wajib lapor LHKAN yang terdiri dari 3.654 pegawai wajib lapor LHKPN dan 5.453 pegawai wajib lapor SPT yang telah melaporkan harta kekayaannya tepat waktu (100%). Capaian kinerja IKK persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/SPT Tahunan) sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun 2023.

### **6. Sasaran Kegiatan 6: “Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks IEPK BPKP.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

#### **6.1 Indeks IEPK BPKP**

IKK indeks IEPK BPKP diperoleh dari nilai IEPK hasil dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPKP tahun berjalan.

Target kinerja indeks IEPK BPKP tahun 2023 berada pada Level 3,00.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas indikator kinerja indeks IEPK BPKP.

### **7. Sasaran Kegiatan 7: “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:



### **7.1. Persentase Pengaduan Yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016**

IKK persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 100,00%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target atas indikator kinerja ini. Namun telah terdapat realisasi kinerja s.d triwulan I tahun 2023 sebesar 100%, diperoleh dari sebanyak 14 pengaduan yang masuk pada triwulan I tahun 2023 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 14 pengaduan pada triwulan I tahun 2023. Capaian kinerja IKK persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun 2023.

### **8. Sasaran Kegiatan 8: “Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu skor kapabilitas APIP.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

#### **1.1 Skor Kapabilitas APIP**

IKK skor kapabilitas APIP diukur sesuai dengan hasil penilaian mandiri Kapabilitas Inspektorat tahun 2023 sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah mendapatkan skor 4,00.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas indikator kinerja skor kapabilitas APIP.

### **9. Sasaran kegiatan 9 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- a. Nilai skor zona integritas unit kerja
- b. Skor IKPA unit kerja
- c. Persentase BMN dalam kondisi baik
- d. Nilai SAKIP



- e. Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja)
- f. Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja)

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **9.1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja**

IKK nilai skor zona integritas unit kerja diukur sesuai dengan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021.

Target kinerja ini pada tahun 2023 senilai 85,00.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK nilai skor Zona Integritas unit kerja.

### **9.2. Skor IKPA Unit Kerja**

IKK skor IKPA unit kerja diukur berdasarkan skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi memperoleh nilai yang baik.

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 95,00.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target, namun realisasi atas IKK skor IKPA unit kerja triwulan I sebesar 100 atau mencapai 105,26 dari target tahun 2023.

### **9.3. Persentase BMN dalam Kondisi Baik**

IKK persentase BMN dalam kondisi baik diukur dengan jumlah BMN dalam kondisi baik di neraca dibagi dengan jumlah seluruh BMN di neraca dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 80,00%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target, namun realisasi atas IKK persentase BMN dalam kondisi baik sampai dengan triwulan I sebesar 49,21% atau mencapai 61,51% dari target tahun 2023. Realisasi diperoleh dari jumlah BMN dengan kondisi baik di neraca sebanyak 311 unit dari total BMN sebanyak 632 unit.

### **9.4. Nilai SAKIP**

IKK nilai SAKIP unit kerja diukur dari nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Tim Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat).





Target kinerja tahun 2023 sebesar 81,00.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK nilai SAKIP unit kerja.

#### 9.5. Persentase Efektivitas Pengendalian

IKK persentase efektivitas pengendalian diukur dari jumlah *existing control* dan rencana tindak pengendalian (RTP) yang berhasil memitigasi risiko sehingga tidak terjadi lagi dibagi dengan jumlah *existing control* dan RTP dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 70,00%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase efektivitas pengendalian.

#### 9.6. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

IKK persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja) diukur dari jumlah realisasi RTP yang diselesaikan dibandingkan dengan seluruh RTP yang ditetapkan.

Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,00%.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023, belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja).

### B. Capaian *Output* Triwulan I 2023

Target *output* pengawasan Inspektorat BPKP Tahun 2023 sesuai RKA sebanyak 70 laporan, dengan target sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 10 laporan atau 14,29% dari target setahun.

Realisasi *output* pengawasan di SIMA-NG PKAU sampai dengan bulan Maret 2023 sebanyak 14 Laporan atau 20,00% dari rencana setahun.

Berikut ringkasan capaian *output* sampai dengan triwulan I tahun 2023 :

Tabel 2. Capaian *Output* Pengawasan sampai dengan Triwulan I Tahun 2023

No.	Jenis Output	Target		Realisasi s.d TW I	Capaian	
		Tahun 2023	s.d Triwulan I		s.d TW I	Tahun 2023
1	EBD.001- Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	46,00	10,00	11,00	110,00%	23,91%
2	EBD.002 - Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	2,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%



No.	Jenis Output	Target		Realisasi s.d TW I	Capaian	
		Tahun 2023	s.d Triwulan I		s.d TW I	Tahun 2023
3	EBD.003 - Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	16,00	0,00	1,00	0,00%	6,25%
4	EBD.004 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	6,00	2,00	2,00	100,00%	33,33%
	<b>Jumlah</b>	70,00	12,00	14,00	116,67%	20,00%

Target *output* dukungan pengawasan Inspektorat BPKP tahun 2023 sebanyak 2 (dua) layanan dengan target *output* sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 2 (dua) layanan. Realisasi sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 2 (dua) layanan atau 100% dari target triwulanan dan tahunan. Pencapaian output lebih rinci tersaji pada Lampiran 2.

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 1.165 OH. Realisasi penugasan hari produktif per pegawai sebanyak 40 PFA sampai dengan triwulan I tahun 2023 sebanyak 29 OH atau 25,40% dari target OH satu tahun sebanyak 4.585 OH.

### C. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Tindak

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 secara umum tidak terdapat kendala dalam pencapaian kinerja *outcome* maupun *output*.

Rencana tindak yang akan dilaksanakan pada triwulan II tahun 2023 adalah melaksanakan kegiatan pengawasan yang menjadi target pada triwulan II tahun 2023 dan mengukur seluruh realisasi indikator kinerja yang telah ditargetkan.

### D. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 telah terealisasi anggaran sebesar Rp2.410.459.032,00 atau 21,93% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp10.989.400.000,00.



Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan perkenan Kepala Biro MKOT kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,

*ditandatangani secara elektronik oleh*

Buntoro

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



## Ringkasan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d TW I	Capaian (%)		Notifikasi
			2023	s.d TW I		s.d TW I	thd target tahunan	
<b>I Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal</b>								
1.1	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	70	0	0,00	0,00	0,00	
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1</b>								
<b>II Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP</b>								
2.1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	0,00	0,00	0,00	
<b>III Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP</b>								
3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35	0	0,00	0,00	0,00	
<b>IV Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan</b>								
4.1	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	0	0,00	0,00	0,00	
<b>V Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara</b>								
5.1	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/SPT)	Persen	100	0	1,00	1,00	1,00	
<b>VI Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP</b>								
6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3	0	0,00	0,00	0,00	
<b>VII Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan</b>								
7.1	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100	0	100,00	100,00	100,00	
<b>VIII Meningkatnya kapabilitas inspektorat</b>								
8.1	Skor Kapabilitas APIP	Nilai	4,0	0	0	0,00	0,00	
<b>IX Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat</b>								
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	0	0,00	0,00	0,00	
9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	0	100,00	105,26	105,26	
9.3	Persentase BMN dalam kondisi baik	Persen	80	0	49,21	0,00	61,51	
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	0	0,00	0,00	0,00	
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	0	0	0,00	0,00	
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	0	0,00	0,00	0,00	



**TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN  
INSPEKTORAT BPKP  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan								Anggaran			SDM		
		Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target s.d Tw I	Realisasi s.d Tw I	Capaian thd Target 2023 (%)	Capaian thd Target Tw (%)	Pagu	Realisasi s.d Tw I	%	Target (OH)	Realisasi (OH) s.d Tw I	%	
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
1 Meningkatkan kualitas hasil pengawasan internal		EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	15	3	4	26,67	133,33	723.785.000	135.638.290	18,74	1526	582	38,14
		EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	Laporan	2	0	0	0,00	0,00	24.153.000	-	0,00	154	0	0,00
		EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	1	0	0	0,00	0,00	-	-	0,00	62	0	
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 1</b>					<b>18</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>26,67</b>	<b>133,33</b>	<b>747.938.000</b>	<b>135.638.290</b>	<b>18,13</b>	<b>1.742</b>	<b>582</b>	<b>33,41</b>
2 Meningkatkan kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	Kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	15	0	1	6,67	0,00	130.826.000	12.744.500	9,74	670	77	11,49
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 2</b>					<b>15</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>6,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130.826.000</b>	<b>12.744.500</b>	<b>9,74</b>	<b>670</b>	<b>77</b>	<b>11,49</b>



Sasaran Kegiatan	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan								Anggaran			SDM			
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Target 2023	Target s.d Tw I	Realisasi s.d Tw I	Capaian thd Target 2023 (%)	Capaian thd Target Tw (%)	Pagu	Realisasi s.d Tw I	%	Target (OH)	Realisasi (OH) s.d Tw I	%	
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	Efektivitas pengendalian internal BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	11	3	3	27,27	100,00	71.051.000	32.018.680	45,06	430	225	52,33
			EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	2	0	0	0,00	0,00	75.381.256	-	0,00	114	0	0,00
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 3</b>						<b>13</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>23,08</b>	<b>100,00</b>	<b>146.432.256</b>	<b>32.018.680</b>	<b>21,87</b>	<b>544</b>	<b>225</b>	<b>41,36</b>
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	Evaluasi pembangunan unit kerja percontohan untuk memperoleh daftar unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WKB/WBBM	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	0	0	0,00	0,00	107.722.000	-	0,00	212	0,00	0,00
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 4</b>						<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.722.000</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>212</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	Transparansi kekayaan ASN	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	0	1	50,00	0,00	-	-	0,00		39	0,00
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 5</b>						<b>2</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0,00</b>
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	Upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	7	2	1	14,29	50,00	303.396.000	67.807.648	22,35		55,00	0,00
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 6</b>						<b>7</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>14,29</b>	<b>50,00</b>	<b>303.396.000</b>	<b>67.807.648</b>	<b>22,35</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Kualitas pengelolaan pengaduan	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	6	2	2	33,33	100,00	386.389.000	108.752.928	28,15		59	0,00
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 7</b>						<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>33,33</b>	<b>100,00</b>	<b>386.389.000</b>	<b>108.752.928</b>	<b>28,15</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>
8	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	Kapabilitas Inspektorat	EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	4	2	2	50,00	100,00	32.329.744	32.329.744	100,00	30	128,00	426,67
			EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	3	0	0	0,00	0,00	338.147.000	-	0,00	1387	0	0,00
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 8</b>						<b>7</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>28,57</b>	<b>100,00</b>	<b>370.476.744</b>	<b>32.329.744</b>	<b>8,73</b>	<b>1417</b>	<b>128,00</b>	<b>9,03</b>
<b>Total Pengawasan</b>						<b>70</b>	<b>12</b>	<b>14</b>	<b>20,00</b>	<b>116,67</b>	<b>2.193.180.000</b>	<b>389.291.790</b>	<b>17,75</b>	<b>4.585</b>	<b>1.165</b>	<b>25,41</b>
<b>Bahan dan ATK Pengawasan</b>												<b>98.908.340</b>	<b>0,00</b>			
9	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	100,00	100,00	197.780.000	69.315.390	35,05			
			EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100,00	100,00	8.598.440.000	1.852.943.512	21,55			
<b>Total Dukungan Manajemen</b>						<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>8.796.220.000</b>	<b>1.922.258.902</b>	<b>21,85</b>			
<b>Total Anggaran</b>											<b>10.989.400.000</b>	<b>2.410.459.032</b>	<b>21,93</b>			





**INSPEKTORAT**  
*INSIGHT TO NAVIGATE THE FUTURE*

LAPORAN KINERJA  
**INSPEKTORAT**  
**BPKP**

---

**S.D TRIWULAN 2 TAHUN 2023**

**NOMOR : OT.04/LHP-165/IN/4/2023**  
**TANGGAL: 27 JUNI 2023**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**  
**INSPEKTORAT**

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120  
Telp. (021) 85910031 (Hunting) Fax. (021) 85910147

Nomor : OT.04/LHP-165/IN/4/2023  
Lampiran : Dua Berkas  
Hal : Laporan Kinerja Inspektorat BPKP  
s.d Triwulan II Tahun 2023

27 Juni 2023

Yth. Kepala Biro MKOT  
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat BPKP s.d. Triwulan II Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

**A. Realisasi dan Capaian Outcome**

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat BPKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 terlihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d TW II	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW II (%)
			2023	s.d TW II		s.d TW II	thd target tahunan	
<b>I Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal</b>								
1.1	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	70	-	22,58	32,26	32,26	32,26
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1</b>						<b>32,26</b>		
<b>II Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP</b>								
2.1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100	-	-	-	-	-
<b>III Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP</b>								
3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35	-	-	-	-	-
<b>IV Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan</b>								
4.1	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	-	75,68	100,90	100,90	100,90
<b>V Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara</b>								
5.1	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	Persen	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VI Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP</b>								
6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3	-	4,00	133,33	133,33	133,33



No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d TW II	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW II (%)
			2023	s.d TW II		s.d TW II	thd target tahunan	
<b>VII Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan</b>								
7.1	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VIII Meningkatnya kapabilitas inspektorat</b>								
8.1	Skor Kapabilitas APiP	Nilai	4,0	4	-	-	-	-
<b>IX Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat</b>								
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	85	91,97	108,20	108,20	45,88
9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	-	100,00	105,26	105,26	
9.3	Persentase BMN dalam kondisi baik	Persen	80	-	49,44	61,80	61,80	
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	-	-	-	-	
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	-	-	-	-	
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	-	-	-	-	

Kinerja Inspektorat BPKP sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Sasaran Kegiatan 1 : “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal”

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil *assurance*. Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

#### 1.1 Persentase Tindak Lanjut Atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance

IKK persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil *assurance* diukur dengan rumus pengukuran indikator sebagai berikut:

Jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan s.d. Triwulan II 2023 dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan s.d Triwulan II 2023. Target kinerja tahun 2023 sebesar 70,00%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum terdapat target, namun telah terdapat realisasi sebesar 22,58% Atau mencapai 32,26 dibandingkan

target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti sampai dengan triwulan II 2023 sebanyak 7 rekomendasi dari 31 rekomendasi penugasan *assurance* yang dilaksanakan s.d triwulan I 2023.

## **2. Sasaran Kegiatan 2: “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Yang Ditindaklanjuti**

IKK persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran indikator sebagai berikut:

Jumlah saran/rekomendasi sesuai Berita Acara yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah rekomendasi sesuai Berita Acara pada tahun sebelumnya, dikalikan 100%. Target kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Sampai dengan Triwulan II 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti.

## **3. Sasaran kegiatan 3 : “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **3.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Unit Kerja yang Ditindaklanjuti**

IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Jumlah atensi/rekomendasi hasil pengawasan terkait penyelenggaraan pengelolaan risiko tahun berjalan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dibagi jumlah atensi/rekomendasi hasil pengawasan terkait penyelenggaraan pengelolaan risiko tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 35%.

Sampai dengan Triwulan II 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti.

## **4. Sasaran Kegiatan 4: “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **4.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan WBK/WBBM**

IKK persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM diukur dengan rumus perhitungan indikator sebagai berikut:

Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM dibagi jumlah unit kerja yang wajib dievaluasi tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 75,00%.

Sampai dengan Triwulan II 2023 belum terdapat target, namun IKK persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM telah terealisasi sebesar 75,68% atau mencapai 100,90% dibandingkan target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari sebanyak 28 unit kerja yang memenuhi kriteria pengusulan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dibandingkan 37 unit kerja yang wajib dievaluasi tahun 2023 (unit kerja yang divalidasi MKOT dan belum berpredikat WBBM).

## **5. Sasaran Kegiatan 5: “Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase ASN yang melaporkan harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/SPT). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), disampaikan bahwa kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan **tidak berlaku**. LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **5.1 Persentase ASN yang melaporkan Harta Kekayaan secara Tepat Waktu (LHPKN/SPT Tahunan)**

IKK persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/SPT Tahunan) diukur dari jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan pada aplikasi e-LHKPN dan pelaporan SPT Tahunan dengan jumlah wajib lapor tahun berjalan dikali 100%.

Target tahun 2023 sebesar 100,00%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum terdapat target atas indikator kinerja ini. Namun, realisasi kinerja s.d triwulan II tahun 2023 sebesar 100%, diperoleh dari sebanyak 5.453 wajib lapor LHKAN yang terdiri dari 3.654 pegawai wajib lapor LHKPN dan 5.453 pegawai wajib lapor SPT yang telah melaporkan harta kekayaannya tepat waktu (100%). Capaian kinerja IKK persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/SPT Tahunan) sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun 2023.

## **6. Sasaran Kegiatan 6: “Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks IEPK BPKP.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **6.1 Indeks IEPK BPKP**

IKK indeks IEPK BPKP diperoleh dari nilai IEPK hasil dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPKP tahun berjalan.

Target kinerja indeks IEPK BPKP tahun 2023 berada pada Level 3,00.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum terdapat target, namun indeks IEPK BPKP sudah terealisasi sebesar 4 atau mencapai 133,33% dibandingkan target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP BPKP Tahun 2023 nomor PE.11/LHP-103/IN/2/2023 tanggal 23 Mei 2023.

## **7. Sasaran Kegiatan 7: “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **7.1. Persentase Pengaduan Yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016**

IKK persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 100,00%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum terdapat target, namun telah terdapat realisasi kinerja s.d triwulan II tahun 2023 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari sebanyak 19 pengaduan yang masuk pada triwulan II tahun 2023 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 19 pengaduan.

## **8. Sasaran Kegiatan 8: “Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu skor kapabilitas APIP.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **8.1 Skor Kapabilitas APIP**

IKK skor kapabilitas APIP diukur sesuai dengan hasil penilaian mandiri Kapabilitas Inspektorat tahun 2023 sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah mendapatkan skor 4,00.

Target kinerja sampai dengan Triwulan II tahun 2023 sebesar 4,00. Namun sampai dengan laporan kinerja diterbitkan, proses penilaian mandiri masih berlangsung. Sehingga belum terdapat realisasi atas IKK skor kapabilitas APIP.

## **9. Sasaran kegiatan 9 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- a. Nilai skor zona integritas unit kerja
- b. Skor IKPA unit kerja
- c. Persentase BMN dalam kondisi baik
- d. Nilai SAKIP
- e. Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja)
- f. Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja)

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **9.1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja**

IKK nilai skor zona integritas unit kerja diukur sesuai dengan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021.

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 85,00.

Target kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebesar 85,00 dan telah terealisasi sebesar 91,97 atau mencapai 108,20% dibandingkan target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Unit Kerja di Lingkungan BPKP Tahun 2023 nomor PE.09/S-373/IN/2/2023 tanggal 26 Mei 2023.

## **9.2. Skor IKPA Unit Kerja**

IKK skor IKPA unit kerja diukur berdasarkan skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi memperoleh nilai yang baik.

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 95,00.

Sampai dengan triwulan I tahun 2023 belum terdapat target, namun realisasi atas IKK skor IKPA unit kerja triwulan II sebesar 100 atau mencapai 105,26 dari target tahun 2023.

## **9.3. Persentase BMN dalam Kondisi Baik**

IKK persentase BMN dalam kondisi baik diukur dengan jumlah BMN dalam kondisi baik di neraca dibagi dengan jumlah seluruh BMN di neraca dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 80,00%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum terdapat target, namun telah terealisasi sebesar 49,44% atau mencapai 61,80% dari target tahun 2023. Realisasi diperoleh dari jumlah BMN dengan kondisi baik di neraca sebanyak 311 unit dari total BMN sebanyak 629 unit.

## **9.4. Nilai SAKIP**

IKK nilai SAKIP unit kerja diukur dari nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Tim Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat).

Target kinerja tahun 2023 sebesar 81,00.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK nilai SAKIP unit kerja.

## **9.5. Persentase Efektivitas Pengendalian**

IKK persentase efektivitas pengendalian diukur dari jumlah *existing control* dan rencana tindak pengendalian (RTP) yang berhasil memitigasi risiko sehingga tidak terjadi lagi dibagi dengan jumlah *existing control* dan RTP dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 70,00%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase efektivitas pengendalian.

#### 9.6. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

IKK persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja) diukur dari jumlah realisasi RTP yang diselesaikan dibandingkan dengan seluruh RTP yang ditetapkan.

Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,00%.

Sampai dengan triwulan II tahun 2023, belum terdapat target dan realisasi atas IKK persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja).

### B. Realisasi *Grand Strategy Enabler* (GSE) dan *Agenda Prioritas Enabler* Pengawasan (APEP)

Berdasarkan Laporan Kegiatan Pembahasan Rencana Aksi atas Agenda Prioritas *Enablers* Pengawasan dan *Grand Strategy Enablers* BPKP Tahun 2023 dan Kesepakatan Target atas Peran *Enablers* Nomor PE.11/LPP-42/IN/2/2023 tanggal 15 Maret 2023, Inspektorat menjadi penanggungjawab strategi taktis sebagai berikut:

No	Kode	Strategi Taktis	Indikator
1	#3	Memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan proses bisnis pengawasan sekaligus memastikan implementasi kendali mutu (KM)	Tersedianya informasi hasil pemantauan terhadap efektivitas penerapan proses bisnis dalam kendali mutu
2	#14	Memastikan Kepatuhan unit kerja dalam menggunakan BISMA pada proses transaksi keuangan (integrasi Bisma dan Citra)	Tersedianya jumlah unit kerja yang menggunakan BISMA pada proses transaksi keuangan
3	#25	Melakukan pemantauan ketercapaian SLA	Hasil pemantauan SLA dan tindaklanjutnya
4	#30	Menyusun dan mengimplementasikan daftar risiko serta mitigasinya terkait pelanggaran integritas	Peta risiko pelanggaran integritas penugasan dengan risiko hukum tinggi dan merancang standar mitigasi risiko untuk penugasan tersebut
5	#31	Melaksanakan internalisasi dan sosialisasi <i>value</i> BPKP dan <i>core value</i> ASN (BerAkhlahk)	Tersedianya hasil pemantauan efektivitas internalisasi <i>value</i> BPKP dan <i>core</i> ASN beserta tindak lanjutnya



No	Kode	Strategi Taktis	Indikator
6	#33	Melakukan internalisasi RMIS	Tersedianya hasil pemantauan efektivitas internalisasi <i>value</i> BPKP dan <i>core value</i> ASN beserta tindak lanjutnya
7	#36	Meningkatkan skill komunikasi dan <i>eksposure</i> penugasan yang mengharuskan pegawai untuk menginisiasi komunikasi	Tersedianya hasil pemantauan efektivitas kemampuan skill komunikasi peserta pelatihan
8	#38	Membangun <i>Smart Workshop</i>	Evaluasi utilitas pemanfaatan <i>smartworkshop</i>

Strategi taktis tersebut, telah *dimapping* oleh Bagian Perencanaan Biro MKOT ke dalam *Agenda Prioritas Enabler* Pengawasan (APEP) BPKP Tahun 2023. Dalam APEP BPKP Tahun 2023, Inspektorat menjadi unit kolaborator dalam pelaksanaan strategi taktis *grand strategy enabler* dan juga menjadi unit penanggungjawab atas agenda prioritas *enabler* pengawasan dengan tema manajemen kinerja topik pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP dan pengawasan intern atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Adapun strategi taktis yang belum disusun rencana aksinya dalam APEP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan SLA (#25)

Rencana aksi atas strategi taktis #25 belum dapat disusun oleh Inspektorat disebabkan SLA yang harus dipantau oleh Inspektorat belum didefinisikan oleh Biro MKOT selaku penanggungjawab indikator penyusun SLA, dan Biro MKOT belum menyusun rencana aksi kegiatan apa yang akan dilaksanakan.

2. Membangun *smart workshop* (#38)

Rencana aksi atas strategi taktis #38 baru dapat dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan yang tertuang dalam *enabler grand strategy*.

Realisasi atas pelaksanaan GSE dan APEP sampai dengan triwulan II tahun 2023 tersaji pada Lampiran 3.

### C. Realisasi dan Capaian *Output*

Target *output* pengawasan Inspektorat BPKP Tahun 2023 sesuai RKA sebanyak 70 laporan, dengan target sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 34 laporan atau 48,57% dari target setahun.

Realisasi *output* pengawasan di SIMA-NG PKAU sampai dengan bulan Juni 2023 sebanyak 26 Laporan atau 76,47% dibandingkan target triwulanan dan 37,14% dibandingkan target tahun 2023.

Berikut ringkasan capaian *output* sampai dengan triwulan II tahun 2023 :

Tabel 2. Capaian *Output* Pengawasan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023

No.	Jenis Output	Target		Realisasi s.d TW I	Capaian	
		Tahun 2023	s.d Triwulan II		s.d TW II	Tahun 2023
1	EBD.001- Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	40,00	26,00	21,00	80,77%	52,50%
2	EBD.002 - Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	2,00	1,00	1,00	0,00%	50,00%
3	EBD.003 - Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	16,00	1,00	1,00	0,00%	6,25%
4	EBD.004 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	12,00	6,00	3,00	50,00%	25,00%
	<b>Jumlah</b>	70,00	34,00	26,00	76,47%	37,14%

Target *output* dukungan pengawasan Inspektorat BPKP tahun 2023 sebanyak 3 (dua) layanan dengan target *output* sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 2 (dua) layanan atau 50% dari target tahun 2023. Pencapaian *output* lebih rinci tersaji pada Lampiran 2.

#### D. Penggunaan Dana dan Analisis Efisiensi

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 telah terealisasi anggaran sebesar Rp5.938.181.070 atau 51,94% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp11.432.156.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi *output* yang dihasilkan sampai dengan triwulan II tahun 2023, total penggunaan dana pengawasan telah efisien. Rincian analisis efisiensi penggunaan dana per indikator kinerja kegiatan tersaji pada lampiran 2.

#### E. Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Analisis Efisiensi

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 1.814 OH. Realisasi penugasan hari produktif per pegawai

sebanyak 40 PFA sampai dengan triwulan II tahun 2023 sebanyak 45,35 OH atau 39,56% dari target OH satu tahun sebanyak 4.585 OH. Jika dibandingkan dengan realisasi *output* yang dihasilkan sampai dengan triwulan II tahun 2023, total penggunaan sumber daya manusia (SDM) pengawasan telah efisien.

Rincian analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia per indikator kinerja kegiatan tersaji pada lampiran 2.

#### **F. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Tindak**

Sampai dengan triwulan II tahun 2023 tidak terdapat kendala dalam pencapaian target *outcome*, namun dalam mencapai target *output* dan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang ditargetkan dalam GSE maupun APEP terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Tumpang tindihnya penugasan pengawasan dan terbatasnya sumber daya manusia pengawasan di Inspektorat mengakibatkan beberapa *output* terlambat diterbitkan;
2. Perencanaan penugasan yang kurang matang, serta supervisi yang belum optimal mengakibatkan pengawasan yang dilaksanakan belum menghasilkan informasi hasil pengawasan yang diharapkan;
3. Terbitnya peraturan baru yang menjadi ruang lingkup GSE maupun APEP sehingga perlu dilakukan penyesuaian desain pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang diharapkan.

Rencana tindak yang akan dilaksanakan pada triwulan III tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan penugasan pengawasan;
2. Mengoptimalkan peran Pengendali Teknis dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan supervisi penyusunan atau penyesuaian desain pengawasan agar langkah kerja yang akan dilaksanakan mampu menghasilkan informasi yang diharapkan;
3. Mengoptimalkan peran Pengendali Teknis dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan supervisi penugasan pengawasan agar hasil pengawasan yang dilaksanakan mampu menghasilkan informasi yang diharapkan;

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Kepala Biro kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,

*ditandatangani secara elektronik oleh*

Buntoro

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



**Ringkasan Kinerja Inspektorat BPKP  
s.d Triwulan II Tahun 2023**

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	TargetTahun 2023		Realisasi s.d TW II	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW II (%)
			2023	s.d TW II		s.d TW II	thd target tahunan	
<b>I Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal</b>								
1.1	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	70	0	22,58	32,26	32,26	32,26
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1</b>						<b>32,26</b>		
<b>II Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP</b>								
2.1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>III Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP</b>								
3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35	0	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>IV Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan</b>								
4.1	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	0	75,68	100,90	100,90	100,90
<b>V Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara</b>								
5.1	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	Persen	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VI Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP</b>								
6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3	0	4,00	133,33	133,33	133,33
<b>VII Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan</b>								
7.1	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VIII Meningkatnya kapabilitas inspektorat</b>								
8.1	Skor Kapabilitas APIP	Nilai	4,0	4	0	0,00	0,00	0,00
<b>IX Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat</b>								
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	85	91,97	108,20	108,20	45,88
9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	0	100,00	105,26	105,26	
9.3	Persentase BMN dalam kondisi baik	Persen	80		49,44	61,80	61,80	
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	0	0,00	0,00	0,00	
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	0	0	0,00	0,00	
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	0	0,00	0,00	0,00	

**TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN  
INSPEKTORAT BPKP  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan								Anggaran			SDM			Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	
		Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target s.d Tw II	Realisasi s.d Tw II	Capaian thd Target 2023 (%)	Capaian thd Target Tw (%)	Pagu	Realisasi s.d Tw II	%	Target (OH)	Realisasi (OH) s.d Tw II	%				
1	3	4	5	6	9	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	Kualitas hasil pengawasan internal	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	15	9	6	40,00	66,67	723.785.000	374.759.653	51,78	1526	1.122	73,53	Efisien	Belum Efisien
			EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	Laporan	2	1	1	50,00	100,00	24.153.000	18.378.000	76,09	154	109	70,78	Efisien	Belum Efisien
			EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	2	1	0	0,00	0,00	-	-	0,00	62	0		Efisien	Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 1</b>					<b>19</b>	<b>11</b>	<b>7</b>	<b>90,00</b>	<b>166,67</b>	<b>747.938.000</b>	<b>393.137.653</b>	<b>52,56</b>	<b>1.742</b>	<b>1.231</b>	<b>70,67</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>	
2	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	Kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	14	0	1	7,14	0,00	130.826.000	12.744.500	9,74	670	77	11,49	Belum Efisien	Belum Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 2</b>					<b>14</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>7,14</b>	<b>0,00</b>	<b>130.826.000</b>	<b>12.744.500</b>	<b>9,74</b>	<b>670</b>	<b>77</b>	<b>11,49</b>	<b>Belum Efisien</b>	<b>Belum Efisien</b>	
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	Efektivitas pengendalian internal BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	5	5	4	80,00	80,00	116.673.000	63.181.228	54,15	430	225	52,33	Efisien	Efisien
			EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP -	Laporan	11	4	1	9,09	25,00	59.665.256	36.992.295	62,00	114	0	0,00	Belum Efisien	Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 3</b>					<b>16</b>	<b>9</b>	<b>5</b>	<b>31,25</b>	<b>55,56</b>	<b>176.338.256</b>	<b>100.173.523</b>	<b>56,81</b>	<b>544</b>	<b>225</b>	<b>41,36</b>	<b>Belum Efisien</b>	<b>Efisien</b>	
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan	Evaluasi pembangunan unit kerja percontohan untuk memperoleh daftar unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	2	4	200,00	200,00	107.722.000	105.610.814	98,04	212	0,00	0,00	Efisien	Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 4</b>					<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>107.722.000</b>	<b>105.610.814</b>	<b>98,04</b>	<b>212</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>	
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	Transparansi kekayaan ASN	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	1	1	50,00	100,00	-	-	0,00	39	0,00	0,00	Efisien	Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 5</b>					<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>0,00</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>	

Sasaran Kegiatan	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan							Anggaran			SDM			Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM		
		Indikator Output Kegiatan	Satuan	Target 2023	Target s.d Tw II	Realisasi s.d Tw II	Capaian thd Target 2023 (%)	Capaian thd Target Tw (%)	Pagu	Realisasi s.d Tw II	%	Target (OH)	Realisasi (OH) s.d Tw II	%				
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	Upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	7	4	2	28,57	50,00	337.396.000	136.464.477	40,45	55,00	0,00	Efisien	Efisien	
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 6</b>				<b>7</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>28,57</b>	<b>50,00</b>	<b>337.396.000</b>	<b>136.464.477</b>	<b>40,45</b>	<b>0</b>	<b>55,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>		
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	Kualitas pengelolaan pengaduan	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	6	5	4	66,67	80,00	386.389.000	245.516.377	63,54	59	0,00	Efisien	Efisien	
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 7</b>				<b>6</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>66,67</b>	<b>80,00</b>	<b>386.389.000</b>	<b>245.516.377</b>	<b>63,54</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>0,00</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>		
8	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	Kapabilitas Inspektorat	EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	1	2	2	200,00	100,00	48.045.744	47.441.744	98,74	30	128,00	426,67	Efisien	Belum Efisien
			EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	3	0	0	0,00	0,00	338.147.000	-	0,00	1387	0	0,00	Efisien	Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 8</b>				<b>4</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>386.192.744</b>	<b>47.441.744</b>	<b>12,28</b>	<b>1417</b>	<b>128,00</b>	<b>9,03</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>		
<b>Total Pengawasan</b>				<b>70</b>	<b>34</b>	<b>26</b>	<b>37,14</b>	<b>76,47</b>	<b>2.272.802.000</b>	<b>1.041.089.088</b>	<b>45,81</b>	<b>4.585</b>	<b>1.814</b>	<b>39,56</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>		
<b>Bahan dan ATK Pengawasan</b>									<b>142.198.000</b>	<b>37.255.873</b>	<b>26,20</b>							
9	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	100,00	100,00	197.780.000	90.399.390	45,71				Efisien	
			EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100,00	100,00	8.689.940.000	4.769.436.719	54,88				Efisien	
			EBB.951	Layanan Sarana dan	Layanan	1	0	0	0,00	0,00	129.436.000	0	0					
<b>Total Dukungan Manajemen</b>				<b>3</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>66,67</b>	<b>100,00</b>	<b>9.017.156.000</b>	<b>4.859.836.109</b>	<b>53,90</b>					<b>Efisien</b>		
<b>Total Anggaran</b>									<b>11.432.156.000</b>	<b>5.938.181.070</b>	<b>51,94</b>							

**GRAND STRATEGY ENABLERS DAN AGENDA PRIORITAS ENABLER PENGAWASAN  
INSPEKTORATS.D TRIWULAN II TAHUN 2023**

NO	KODE GSE	TEMA	TOPIK ENABLERS	KONDISI YANG DIHARAPKAN	KONDISI SAMPAI DENGAN TW II	SIMPULAN STRATEGI	TIMELINE PELAKSANAAN STRATEGI
1	#14	Manajemen Kinerja	Prioritasi penggunaan anggaran	Pemanfaatan anggaran berfokus pada prioritas organisasi: 1. Potret tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; 2. Potensi efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran; 3. Potensi efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran; 4. Potensi ketercapaian tujuan pada sektor prioritas pengawasan; 5. Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran; 6. Rekomendasi perbaikan	Inspektorat belum melakukan monitoring dan evaluasi kesesuaian prioritas penggunaan anggaran. Evaluasi perencanaan dan anggaran yang telah dilaksanakan pada triwulan I tahun 2023 belum mampu menghasilkan informasi dari kondisi yang diharapkan.	1. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. 2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja dan anggaran.	TW 3, 4
2	APEP non GSE	Manajemen Kinerja	Optimalisasi Pembiayaan (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)	1. Potret kebijakan dan tata kelola pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 2. Potret Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (analisis tren, portofolio dan pengelolaan risiko); 3. Akuntabilitas pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, termasuk efisiensi biaya pinjaman; 4. Efektivitas pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 5. Ruang optimalisasi pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah untuk kebutuhan pengawasan; 6. Identifikasi hambatan; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	1. Inspektorat telah melakukan pendampingan dan QA pelaksanaan STAR AF. 2. berdasarkan surat permintaan PMU STAR AF, inspektorat telah melakukan telah pelaksanaan perencanaan pembangunan Smart Building STAR AF.	1. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang berada di BPKP (STAR AF dan MDTF). (TW3) 2. Melakukan audit kinerja dan keuangan pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang berada di BPKP (STAR AF dan MDTF). (TW3)	TW 3, 4
3	#3	Manajemen Kinerja	Penjaminan Kualitas atas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Pengawasan, dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP	Perencanaan Pengawasan: 1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan perencanaan kegiatan pengawasan antara Pusat dan Perwakilan; 2. Efektivitas pelaksanaan konvergensi perencanaan kegiatan pengawasan; 3. Analisis ketepatan metodologi pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengawasan; 4. Permasalahan dan hambatan perencanaan kegiatan pengawasan; 5. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi  Pelaksanaan Pengawasan: 1. Analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengawasan; 2. Analisis ketepatan penggunaan data dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan; 3. Analisis pelaksanaan reviu berjenjang dalam rangka menjaga kualitas/mutu kegiatan pengawasan; 4. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan pengawasan; 5. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi  Pelaporan Hasil Pengawasan: 1. Analisis mutu hasil pengawasan, meliputi: 1) Ketepatan dan keselarasan penyajian simpulan hasil pengawasan berdasarkan data/informasi yang diuji; 2) Relevansi simpulan terhadap rekomendasi yang diberikan; 3) Rekomendasi yang diberikan bersifat implementatif dalam perbaikan kebijakan; 2. Permasalahan dan hambatan pelaporan hasil pengawasan  Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP	Pengawasan atas topik Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pemantauan TL Pengawasan, hasil pengawasan belum dapat menggambarkan kondisi saat ini secara komprehensif. Saat ini Inspektorat sedang mendesain pengawasan atas topik-topik tersebut mengacu pada Perban 2/2023 yang baru diterbitkan.	1. Melakukan penyelesaian desain pengawasan yang mengacu pada Perban 2/2023; 2. Melakukan evaluasi/penilaian atas implementasi Perban 2/2023 pada direktorat di masing-masing keudeputian; 3. Menyampaikan hasil evaluasi/penilaian implementasi Perban 2/2023 kepada Kepala BPKP. 4. Melakukan money pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP.	TW 3, 4
4	#30 dan #33	Metodologi dan Data	Efektivitas Pengelolaan Risiko	1. Gambaran kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor prioritas pengawasan (identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko); 2. Analisis efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko terhadap ketercapaian tujuan sektor prioritas pengawasan (APP dan APPD) (termasuk simpulan potensi ketercapaian target sektor prioritas); 3. Identifikasi hambatan penyelenggaraan pengelolaan risiko; 4. Best practice penyelenggaraan pengelolaan risiko pada sektor prioritas; 5. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional	Inspektorat telah melakukan reviu dan evaluasi atas penyelenggaraan MR di lingkungan BPKP tahun 2022. Hasilnya Keudeputian (Rendal) belum sepenuhnya secara spesifik mengidentifikasi risiko sektor prioritas pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya.	1. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil eviu dan evaluasi atas penyelenggaraan MR di lingkungan BPKP tahun 2022. 2. Melakukan pengawasan atas pengelolaan risiko sektor prioritas pengawasan pada unit kerja BPKP.	TW 3, 4



NO	KODE GSE	TEMA	TOPIK ENABLERS	KONDISI YANG DIHARAPKAN	KONDISI SAMPAI DENGAN TW II	SIMPULAN STRATEGI	TIMELINE PELAKSANAAN STRATEGI
5	APEP non GSE	Manajemen Kinerja	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP	Analisis ketepatan dan keselarasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Pusat dan Perwakilan; Potret pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP (termasuk saldo TPB dan TPTD); Analisis kebermanfaatan rekomendasi hasil pengawasan BPKP; Identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan TLHP BPKP Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi	Hasil pemantauan yang dilakukan pada triwulan I 2023 didapati bahwa tindak lanjut hasil pengawasan BPKP belum maksimal, nilai capaian tindak lanjut sebesar 43,56%. hal ini disebabkan belum dilakukannya prosedur pemantauan TL (SP1 dst) serta pelaksanaan tindak lanjut yang belum tuntas. Rekomendasi hasil pengawasan yang telah ditindaklanjuti telah membantu unit kerja untuk mencapai tujuan (contoh: optimalisasi PAD, penyusunan kebijakan untuk pengendalian) Database hasil pengawasan pada aplikasi SIMA belum menggambarkan hasil pengawasan sebenarnya karena penginputan belum tertib	melakukan pemantauan triwulanan dan memberikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan proses bisnis penginputan temuan, pemantauan temuan, dan tindak lanjut	TW 3, 4
6	#36	Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan	1. Analisis keselarasan kebijakan pendidikan dan pelatihan pengawasan/dukungan pengawasan dengan lingkungan strategis; 2. Gambaran sebaran kebutuhan pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan; 3. Analisis pemenuhan kebutuhan dan kompetensi tenaga pengajar; 4. Analisis kesesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan lingkungan strategis; 5. Gambaran jumlah dan sebaran lulusan peserta pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan; 6. Analisis kebermanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan terhadap kualitas hasil pengawasan; 7. Permasalahan dan hambatan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	Pegawasan atas peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan belum dilaksanakan	1. Berkoordinasi dengan Pusdiklatwas dan Biro SDM perihal kebijakan dan implementasi pendidikan pelatihan pengawasan/dukungan pengawasan bagi SDM di BPKP 2. Penyusunan desain pengawasan atas kualitas pendidikan dan pelatihan	TW 3, 4
7	#31	Perlindungan Hukum dan Reputasi	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Pengawasan	1. Kualitas penerapan pengendalian kecurangan oleh Unit Kerja meliputi: - Profil risiko kecurangan tematik; - Profil risiko Hambatan Pengawasan Tematik; 2. Analisis kondisi penanganan pengaduan di BPKP; 3. Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan (lesson learned dari pencegahan, deteksi dan respon kecurangan); 4. Rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian hambatan pengawasan	1a) Dari Reviu atas Penilaian Risiko Fraud tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan BPKP diperoleh informasi sebagai berikut: 1) Terdapat 7 unit kerja BPKP yang belum mengidentifikasi risiko fraud. 2) Terdapat 19 pernyataan risiko pada 9 unit kerja yang belum menetapkan konteks sasaran atas risiko fraud yang telah diidentifikasi 3) Pernyataan risiko fraud tidak tepat untuk dimasukkan dalam kategori risiko fraud. 4) Kesalahan dalam memberikan kodifikasi pada risiko kategori fraud. 5) Analisis risiko belum mempertimbangkan existing control.. 6) Analisis risiko yang dilakukan tidak tepat dalam menentukan signifikansi level kemungkinan dan dampak sehingga tidak tepat dalam menetapkan signifikansi risiko. 7) Unit kerja belum menetapkan RTP secara lengkap untuk semua risiko prioritas. 8) Empat unit kerja tidak melakukan analisis RCA/akar penyebab risiko kerja atas 4 pernyataan risiko. 9) Sebanyak 6 unit kerja belum merencanakan periode pelaksanaan RTP atas 21 risiko fraud yang menjadi risiko prioritas. 10) Waktu realisasi RTP belum tepat. Selain itu penyelenggaraan Fraud Risiko Assesment pada APP TW I tahun 2023 juga dilakukan reviu oleh Tim Inspektorat dengan hasil sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan FRA APP yang dilakukan oleh BPKP merupakan risiko fraud kegiatan/program dari obyek pemeriksaan, bukan risiko fraud atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. 2) Hasil FRA APP yang dilakukan BPKP pada program/kegiatan Obyek Pemeriksaan pada TW I dengan kondisi sebagai berikut: (a) Terdapat 21 pernyataan risiko oleh obyek pemeriksaan yang belum dilengkapi uraian dampak. (b) Terdapat 756 pernyataan risiko dengan skor residual risk meningkat dibandingkan skor inherent risk meskipun telah dinyatakan telah dipasang pengendalian dengan uraian "memadai", terjadi pada 27 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. (c) Terdapat 5 pernyataan risiko yang belum ada pengendalian terpasang, namun dinyatakan bahwa pengendalian yang dilakukan telah memadai di sisi lain skala residual risk meningkat, terjadi pada 5 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. (d) Terdapat 24 pernyataan risiko dengan pengendalian terpasang "tidak memadai" namun tidak membuat	1. Menyusun atensi terkait risiko fraud sejenis ke Biro MKOT selaku lini dua sebagai minimal sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan ke seluruh unit kerja di lingkungan BPKP 2. Menyenggarakan MOOC untuk meningkatkan pemahaman terkait pengendalian fraud di lingkungan BPKP 3. Menyusun Kebijakan Perlindungan Pelapor 4. Memperluas Identifikasi Hambatan Identifikasi Pengawasan APP pada hampir ke seluruh unit kerja untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan alternatif perbaikan.	TW 3, 4

# LAPORAN KINERJA

## TRIWULAN III TAHUN 2023

**OT.04/LPP-251/IN/4/2023**  
Tanggal 6 Oktober 2023

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN****INSPEKTORAT**

Jalan Pramuka No. 33 Jakarta 13120  
Telp. (021) 85910031 (Hunting) Fax. (021) 85910147

Nomor : OT.04/LPP-251/IN/4/2023  
Lampiran : Tiga Berkas  
Hal : Laporan Kinerja Inspektorat BPKP  
s.d Triwulan III Tahun 2023

6 Oktober 2023

Yth. Kepala Biro MKOT  
di Jakarta

Berikut kami sampaikan Laporan Kinerja Inspektorat BPKP s.d. Triwulan III Tahun 2023 dengan uraian sebagai berikut.

**A. Realisasi dan Capaian Outcome**

Hasil pengukuran kinerja Inspektorat BPKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 terlihat pada Tabel 1, sebagai berikut:

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d TW III	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)
			2023	s.d TW III		s.d TW III	thd target tahunan	
<b>I Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal</b>								
1.1	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	70	35	38,32	109,48	54,74	54,74
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1</b>						<b>109,48</b>		
<b>II Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP</b>								
2.1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100	-	69,47	69,47	69,47	69,47
<b>III Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP</b>								
3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35	-	34,95	99,85	99,85	99,85
<b>IV Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan</b>								
4.1	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	75	75,68	100,90	100,90	100,90

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Tahun 2023		Realisasi s.d TW III	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)
			2023	s.d TW III		s.d TW III	thd target tahunan	
<b>V Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara</b>								
5.1	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	Persen	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VI Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP</b>								
6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3	3	4,00	133,33	133,33	133,33
<b>VII Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan</b>								
7.1	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100	-	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VIII Meningkatnya kapabilitas inspektorat</b>								
8.1	Skor Kapabilitas APIP	Nilai	4,0	4	-	-	-	-
<b>IX Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat</b>								
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	85	91,97	108,20	108,20	56,25
9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	-	99,06	104,27	104,27	
9.3	Persentase BMN dalam kondisi baik	Persen	80	-	100,00	125,00	125,00	
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	-	-	-	-	
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	-	-	-	-	
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	-	-	-	-	

Kinerja Inspektorat BPKP sampai dengan Triwulan III Tahun 2023 sebagaimana pada Tabel 1 dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Sasaran Kegiatan 1 : “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Hasil Pengawasan Internal” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil *assurance*. Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **1.1 Persentase Tindak Lanjut Atas Saran/Rekomendasi Kepatuhan Hasil Assurance**

IKK persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil *assurance* diukur dengan rumus pengukuran indikator sebagai berikut:

Jumlah tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan s.d. Triwulan III 2023 dibagi jumlah rekomendasi hasil pengawasan s.d Triwulan III 2023.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 70,00%.

Target kinerja s.d. triwulan III tahun 2023 sebesar 35% dan telah terealisasi sebesar 38,32% atau mencapai 54,74% dibandingkan target tahun 2023.

Realisasi tersebut diperoleh dari jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti s.d. triwulan III tahun 2023 sebesar 41 rekomendasi, dibandingkan dengan jumlah rekomendasi penugasan *assurance* yang dilaksanakan s.d triwulan III tahun 2023 sebesar 107 rekomendasi.

## **2. Sasaran Kegiatan 2: “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pelaksanaan SAKIP BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **2.1 Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP Unit Kerja Yang Ditindaklanjuti**

IKK persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran indikator sebagai berikut:

Jumlah saran/rekomendasi sesuai Berita Acara yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan, dibagi dengan jumlah rekomendasi sesuai Berita Acara pada tahun sebelumnya, dikalikan 100%. Target kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 100%.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023. Namun telah terdapat realisasi s.d. triwulan III tahun 2023 sebesar 66 rekomendasi atau mencapai 69,47% dari target tahun 2023 sebesar 95 rekomendasi.

### **3. Sasaran kegiatan 3 : “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Efektivitas Pengendalian Internal BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

#### **3.1 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Unit Kerja yang Ditindaklanjuti**

IKK persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Jumlah atensi/rekomendasi hasil pengawasan terkait penyelenggaraan pengelolaan risiko tahun berjalan yang ditindaklanjuti oleh unit kerja dibagi jumlah atensi/rekomendasi hasil pengawasan terkait penyelenggaraan pengelolaan risiko tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 35%.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023. Namun telah terdapat realisasi s.d. triwulan III tahun 2023 sebesar 137 rekomendasi atau mencapai 34,95% dari 392 rekomendasi.

### **4. Sasaran Kegiatan 4: “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Evaluasi Pembangunan Unit Kerja Percontohan” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

#### **4.1 Persentase Unit Kerja yang Memenuhi Syarat Pengusulan WBK/WBBM**

IKK persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM diukur dengan rumus perhitungan indikator sebagai berikut:

Jumlah unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM dibagi jumlah unit kerja yang wajib dievaluasi tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 75,00%.

Target kinerja s.d. triwulan III tahun 2023 sebesar 75% dan telah terealisasi sebesar 75,68% atau mencapai 100,90% dibandingkan target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari 28 unit kerja yang memenuhi kriteria pengusulan untuk memperoleh predikat WBK/WBBM dibandingkan 37 unit kerja yang wajib dievaluasi tahun 2023 (unit kerja yang divalidasi MKOT dan belum berpredikat WBBM).

## **5. Sasaran Kegiatan 5: “Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Transparansi Kekayaan Aparatur Sipil Negara” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase ASN yang melaporkan harta kekayaan secara tepat waktu (LHKPN/SPT). Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 02 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), disampaikan bahwa kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi Pemerintah dinyatakan **tidak berlaku**. LHKAN merupakan kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap Aparatur Negara baik berupa LHKPN maupun SPT Tahunan.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **5.1 Persentase ASN yang melaporkan Harta Kekayaan secara Tepat Waktu (LHKPN/SPT Tahunan)**

IKK persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHKPN/SPT Tahunan) diukur dari jumlah ASN yang melaporkan harta kekayaan pada aplikasi e-LHKPN dan pelaporan SPT Tahunan dengan jumlah wajib lapor tahun berjalan dikali 100%.

Target tahun 2023 sebesar 100,00%.

Target kinerja s.d. triwulan III tahun 2023 sebesar 100% dan telah terealisasi sebesar 100% atau mencapai 100% dibandingkan target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari sebanyak 5.453 wajib lapor LHKAN yang terdiri dari 3.654 pegawai wajib lapor LHKPN dan 5.453 pegawai wajib lapor SPT yang telah melaporkan harta kekayaannya tepat waktu (100%). Capaian kinerja IKK persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan

secara tepat waktu (LHPKN/SPT Tahunan) sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 100% dibandingkan dengan target tahun 2023.

## **6. Sasaran Kegiatan 6: “Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi di Lingkungan BPKP”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Upaya Pencegahan Korupsi Di Lingkungan BPKP” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu indeks IEPK BPKP.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **6.1 Indeks IEPK BPKP**

IKK indeks IEPK BPKP diperoleh dari nilai IEPK hasil dari Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP BPKP tahun berjalan.

Target kinerja indeks IEPK BPKP tahun 2023 berada pada Level 3,00.

Target kinerja s.d. triwulan III tahun 2023 berada pada Level 3,00 dan telah terealisasi pada Level 4,00 atau mencapai 133,33% dibandingkan target tahun 2023. Realisasi tersebut diperoleh dari Laporan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Penyelenggaraan Maturitas SPIP BPKP Tahun 2023 nomor PE.11/LHP-103/IN/2/2023 tanggal 23 Mei 2023.

## **7. Sasaran Kegiatan 7: “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pengaduan” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

### **7.1. Persentase Pengaduan Yang Telah Ditindaklanjuti Sesuai Perka BPKP Nomor 2 Tahun 2016**

IKK persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti diukur dengan rumus pengukuran sebagai berikut:

Jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan pengaduan masyarakat yang masuk pada tahun berjalan, dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 100,00%.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023. Namun telah terdapat realisasi kinerja s.d triwulan III tahun 2023 sebesar 100% atau mencapai 100% dari target tahun 2023. Realisasi tersebut



diperoleh dari sebanyak 37 pengaduan yang masuk pada triwulan III tahun 2023 dan telah ditindaklanjuti sebanyak 37 pengaduan.

#### **8. Sasaran Kegiatan 8: “Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Kapabilitas Inspektorat” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 1 (satu) indikator kinerja yaitu skor kapabilitas APIP.

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

##### **8.1 Skor Kapabilitas APIP**

IKK skor kapabilitas APIP diukur sesuai dengan hasil penilaian mandiri Kapabilitas Inspektorat tahun 2023 sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kapabilitas APIP pada K/L/D.

Target kinerja ini pada tahun 2023 adalah mendapatkan skor 4,00.

Target kinerja sampai dengan Triwulan III tahun 2023 sebesar 4,00. Namun sampai dengan laporan kinerja diterbitkan, proses penilaian mandiri masih berlangsung. Sehingga belum terdapat realisasi atas IKK skor kapabilitas APIP.

#### **9. Sasaran kegiatan 9 : “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Inspektorat”**

Pencapaian Sasaran Kegiatan “Meningkatnya Tata Kelola Inspektorat” yang menjadi target Inspektorat BPKP ditunjukkan oleh pencapaian 6 (enam) indikator kinerja yaitu:

- a. Nilai skor zona integritas unit kerja
- b. Skor IKPA unit kerja
- c. Persentase BMN dalam kondisi baik
- d. Nilai SAKIP
- e. Persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP unit kerja)
- f. Persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja)

Uraian capaian Indikator Kinerja tersebut sebagai berikut:

##### **9.1. Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja**

IKK nilai skor zona integritas unit kerja diukur sesuai dengan hasil penilaian mandiri pembangunan zona integritas yang mengacu pada Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021.

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 85,00.

Target kinerja sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebesar 85,00 dan telah terealisasi sebesar 91,97 atau mencapai 108,20% dibandingkan target tahun

2023. Realisasi tersebut diperoleh dari Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Pada Unit Kerja di Lingkungan BPKP Tahun 2023 nomor PE.09/S-373/IN/2/2023 tanggal 26 Mei 2023.

## **9.2. Skor IKPA Unit Kerja**

IKK skor IKPA unit kerja diukur berdasarkan skor indikator kinerja pelaksanaan anggaran dari Kementerian Keuangan dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi memperoleh nilai yang baik.

Target kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 95,00.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023. Namun telah terdapat realisasi kinerja s.d triwulan III tahun 2023 sebesar 99,06 atau mencapai 104,27% dari target tahun 2023.

## **9.3. Persentase BMN dalam Kondisi Baik**

IKK persentase BMN dalam kondisi baik diukur dengan jumlah BMN dalam kondisi baik di neraca dibagi dengan jumlah seluruh BMN di neraca dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 80,00%.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023. Namun telah terdapat realisasi kinerja s.d triwulan III tahun 2023 sebesar 100% atau mencapai 125% dari target tahun 2023. Realisasi diperoleh dari jumlah BMN dengan kondisi baik di neraca sebanyak 626 unit dari total BMN sebanyak 626 unit.

## **9.4. Nilai SAKIP**

IKK nilai SAKIP unit kerja diukur dari nilai SAKIP berdasarkan hasil evaluasi SAKIP dari Tim Inspektorat, atau minimal hasil penilaian mandiri (bila belum ada penilaian dari Inspektorat).

Target kinerja tahun 2023 sebesar 81,00.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023 sehingga s.d. triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi.

### 9.5. Persentase Efektivitas Pengendalian

IKK persentase efektivitas pengendalian diukur dari jumlah *existing control* dan rencana tindak pengendalian (RTP) yang berhasil memitigasi risiko sehingga tidak terjadi lagi dibagi dengan jumlah *existing control* dan RTP dikali 100%.

Target kinerja tahun 2023 sebesar 70,00%.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023 sehingga s.d. triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi.

### 9.6. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)

IKK persentase penyelesaian RTP (MRI unit kerja) diukur dari jumlah realisasi RTP yang diselesaikan dibandingkan dengan seluruh RTP yang ditetapkan.

Target kinerja pada tahun 2023 sebesar 100,00%.

IKK tersebut ditargetkan untuk direalisasikan pada triwulan IV tahun 2023 sehingga s.d. triwulan III tahun 2023 belum terdapat realisasi.

## B. Realisasi *Grand Strategy Enabler* (GSE) dan Agenda Prioritas *Enabler* Pengawasan (APEP)

Berdasarkan Laporan Kegiatan Pembahasan Rencana Aksi atas Agenda Prioritas *Enablers* Pengawasan dan *Grand Strategy Enablers* BPKP Tahun 2023 dan Kesepakatan Target atas Peran *Enablers* Nomor PE.11/LPP-42/IN/2/2023 tanggal 15 Maret 2023, Inspektorat menjadi penanggungjawab strategi taktis sebagai berikut:

No	Kode	Strategi Taktis	Indikator
1	#3	Memantau dan mengevaluasi efektivitas penerapan proses bisnis pengawasan sekaligus memastikan implementasi kendali mutu (KM)	Tersedianya informasi hasil pemantauan terhadap efektivitas penerapan proses bisnis dalam kendali mutu
2	#14	Memastikan Kepatuhan unit kerja dalam menggunakan BISMA pada proses transaksi keuangan (integrasi Bisma dan Citra)	Tersedianya jumlah unit kerja yang menggunakan BISMA pada proses transaksi keuangan
3	#25	Melakukan pemantauan ketercapaian SLA	Hasil pemantauan SLA dan tindaklanjutnya

No	Kode	Strategi Taktis	Indikator
4	#30	Menyusun dan mengimplementasikan daftar risiko serta mitigasinya terkait pelanggaran integritas	Peta risiko pelanggaran integritas penugasan dengan risiko hukum tinggi dan merancang standar mitigasi risiko untuk penugasan tersebut
5	#31	Melaksanakan internalisasi dan sosialisasi <i>value</i> BPKP dan <i>core value</i> ASN (BerAkhlaq)	Tersedianya hasil pemantauan efektivitas internalisasi <i>value</i> BPKP dan <i>core</i> ASN beserta tindak lanjutnya
6	#33	Melakukan internalisasi RMIS	Terselenggaranya pemantauan terhadap kepatuhan penerapan RMIS serta tindak lanjutnya.
7	#36	Meningkatkan skill komunikasi dan <i>eksposure</i> penugasan yang mengharuskan pegawai untuk menginisiasi komunikasi	Tersedianya hasil pemantauan efektivitas kemampuan skill komunikasi peserta pelatihan
8	#38	Membangun <i>Smart Workshop</i>	Evaluasi utilitas pemanfaatan <i>smartworkshop</i>

Strategi taktis tersebut, telah *dimapping* oleh Bagian Perencanaan Biro MKOT ke dalam *Agenda Prioritas Enabler* Pengawasan (APEP) BPKP Tahun 2023. Dalam APEP BPKP Tahun 2023, Inspektorat menjadi unit kolaborator dalam pelaksanaan strategi taktis *grand strategy enabler* dan juga menjadi unit penanggung jawab atas agenda prioritas *enabler* pengawasan dengan tema manajemen kinerja topik pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP dan pengawasan intern atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Adapun strategi taktis yang belum disusun rencana aksinya dalam APEP adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pemantauan SLA (#25)

Rencana aksi atas strategi taktis #25 belum dapat disusun oleh Inspektorat disebabkan SLA yang harus dipantau oleh Inspektorat belum didefinisikan oleh Biro MKOT selaku penanggungjawab indikator penyusun SLA, dan Biro MKOT belum menyusun rencana aksi kegiatan yang akan dilaksanakan.

## 2. Membangun *smart workshop* (#38)

Rencana aksi atas strategi taktis #38 baru dapat dilaksanakan pada tahun 2024 sesuai dengan rencana waktu pelaksanaan yang tertuang dalam *enabler grand strategy*.

Realisasi atas pelaksanaan GSE dan APEP sampai dengan triwulan III tahun 2023 tersaji pada Lampiran 3.

### C. Realisasi dan Capaian *Output*

Target *output* pengawasan Inspektorat BPKP Tahun 2023 sesuai RKA sebanyak 70 laporan, dengan target sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 40 laporan atau 57,14% dari target setahun.

Realisasi *output* pengawasan di SIMA-NG PKAU sampai dengan bulan September 2023 sebanyak 60 Laporan atau 150% dibandingkan target triwulanan dan 85,71% dibandingkan target tahun 2023.

Berikut ringkasan capaian *output* sampai dengan triwulan III tahun 2023 :

Tabel 2. Capaian *Output* Pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2023

No.	Jenis Output	Target		Realisasi s.d TW III	Capaian (%)	
		Tahun 2023	s.d Triwulan III		s.d TW III	Tahun 2023
1	EBD.001- Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	46	33	34	103,03	73,91
2	EBD.002 - Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	2	0	2	#DIV/0!	100
3	EBD.003 - Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	16	1	20	2.000,00	125,00
4	EBD.004 - Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	6	6	4	66,67	66,67
	<b>Jumlah</b>	70,00	40,00	60,00	150,00	85,71

Target *output* dukungan pengawasan Inspektorat BPKP tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) layanan dengan target *output* sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 2 (dua) layanan atau 66,67% dari target tahun 2023. Pencapaian *output* lebih rinci tersaji pada Lampiran 2.

#### **D. Penggunaan Dana dan Analisis Efisiensi**

Sampai dengan triwulan III tahun 2023 telah terealisasi anggaran sebesar Rp9.119.336.093,00 atau 77,84% dari total anggaran tahun 2023 sebesar Rp11.715.300.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi *output* yang dihasilkan sampai dengan triwulan III tahun 2023, total penggunaan dana pengawasan telah efisien. Rincian analisis efisiensi penggunaan dana per indikator kinerja kegiatan tersaji pada lampiran 2.

#### **E. Penggunaan Sumber Daya Manusia dan Analisis Efisiensi**

Realisasi penggunaan hari produktif pengawasan sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 4.447 OH. Realisasi penugasan hari produktif per pegawai sebanyak 40 PFA sampai dengan triwulan III tahun 2023 sebanyak 111,175 OH atau 79,17% dari target OH satu tahun sebanyak 5.617 OH. Jika dibandingkan dengan realisasi *output* yang dihasilkan sampai dengan triwulan III tahun 2023, total penggunaan sumber daya manusia (SDM) pengawasan telah efisien.

Rincian analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia per indikator kinerja kegiatan tersaji pada lampiran 2.

#### **F. Kendala Pencapaian Target dan Rencana Tindak**

Sampai dengan triwulan III tahun 2023 tidak terdapat kendala dalam pencapaian target *outcome*, namun dalam mencapai target *output* dan menghasilkan informasi hasil pengawasan yang ditargetkan dalam GSE maupun APEP terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut:

1. Tumpang tindihnya penugasan pengawasan dan terbatasnya sumber daya manusia pengawasan di Inspektorat mengakibatkan beberapa *output* terlambat diterbitkan;
2. Perencanaan penugasan yang kurang matang, serta supervisi yang belum optimal mengakibatkan pengawasan yang dilaksanakan belum menghasilkan informasi hasil pengawasan yang diharapkan;
3. Terbitnya peraturan baru yang menjadi ruang lingkup GSE maupun APEP sehingga perlu dilakukan penyesuaian desain pengawasan agar dapat menghasilkan informasi hasil pengawasan yang diharapkan.

Rencana tindak yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV tahun 2023 antara lain sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan monitoring pelaksanaan penugasan pengawasan;
2. Mengoptimalkan peran Pengendali Teknis dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan supervisi penyusunan atau penyesuaian desain pengawasan agar langkah kerja yang akan dilaksanakan mampu menghasilkan informasi yang diharapkan;
3. Mengoptimalkan peran Pengendali Teknis dan Koordinator Pengawasan dalam melakukan supervisi penugasan pengawasan agar hasil pengawasan yang dilaksanakan mampu menghasilkan informasi yang diharapkan.

Demikian kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerjasama Kepala Biro kami ucapkan terimakasih.

Inspektur,

*ditandatangani secara elektronik oleh*

Buntoro

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Utama
2. Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi



## Ringkasan Kinerja Inspektorat BPKP Tahun 2023

No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	TargetTahun 2023		Realisasi s.d TW III	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)
			2023	s.d TW III		s.d TW III	thd target tahunan	
<b>I Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal</b>								
1.1	Persentase tindak lanjut atas saran/rekomendasi kepatuhan hasil assurance	Persen	70	35	38,32	109,48	54,74	109,48
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Kegiatan 1</b>						<b>109,48</b>		
<b>II Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP</b>								
2.1	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	100	0	69,47	69,47	69,47	69,47
<b>III Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP</b>								
3.1	Persentase rekomendasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan pengelolaan risiko unit kerja yang ditindaklanjuti	Persen	35	0	34,95	99,85	99,85	99,85
<b>IV Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan</b>								
4.1	Persentase unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	Persen	75	75	75,68	100,90	100,90	100,90
<b>V Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara</b>								
5.1	Persentase ASN yang melaporkan Harta kekayaan secara tepat waktu (LHPKN/LHKASN)	Persen	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VI Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP</b>								
6.1	Indeks IEPK BPKP	Nilai	3	4	4,00	133,33	133,33	133,33
<b>VII Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan</b>								
7.1	Persentase pengaduan yang telah ditindaklanjuti sesuai Perka BPKP No 2/2016	Persen	100	0	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>VIII Meningkatnya kapabilitas inspektorat</b>								
8.1	Skor Kapabilitas APIP	Nilai	4,0	4	0	0,00	0,00	0,00



No.	Sasaran Kegiatan	Satuan	TargetTahun 2023		Realisasi s.d TW III	Capaian (%)		Rata-Rata Capaian s.d TW III (%)
			2023	s.d TW III		s.d TW III	thd target tahunan	
<b>IX</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat</b>							
9.1	Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Nilai	85	85	91,97	108,20	108,20	56,25
9.2	Skor IKPA Unit Kerja	Skor Skala 100	95	0	99,06	104,27	104,27	
9.3	Persentase BMN dalam kondisi baik	Persen	80		100,00	125,00	125,00	
9.4	Nilai SAKIP	Nilai	81	0	0,00	0,00	0,00	
9.5	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	0	0	0,00	0,00	
9.6	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	0	0,00	0,00	0,00	

**TARGET, REALISASI DAN CAPAIAN INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN  
INSPEKTORAT BPKP  
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III TAHUN 2023**

Sasaran Kegiatan	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan								Anggaran			SDM			Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Target 2023	Target s.d Tw III	Realisasi s.d Tw III	Capaian thd Target 2023 (%)	Capaian thd Target Tw (%)	Pagu	Realisasi s.d Tw III	%	Target (OH)	Realisasi (OH) s.d Tw III	%		
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
1	Meningkatnya kualitas hasil pengawasan internal	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	15	9	9	60,00	100,00	723.785.000	609.383.124	84,19	1526	1.122	73,53	Efisien	Efisien
		EBD.002	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Koordinasi Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan Internal - Pelaksanaan Koordinasi	Laporan	2	0	2	100,00	0,00	24.153.000	20.078.000	83,13	154	109	70,78	Belum Efisien	Efisien
		EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	1	1	1	100,00	100,00	-	-	0,00	62	454	732,26	Efisien	Belum Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 1</b>					<b>18</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>66,67</b>	<b>120,00</b>	<b>747.938.000</b>	<b>629.461.124</b>	<b>84,16</b>	<b>1.742</b>	<b>1.685</b>	<b>96,73</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>
2	Meningkatnya kualitas evaluasi pelaksanaan SAKIP BPKP	EBD.003	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Evaluasi SAKIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	15	0	19	126,67	0,00	130.826.000	126.796.925	96,92	670	1.389	207,31	Belum Efisien	Belum Efisien
		<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 2</b>			<b>15</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>130.826.000</b>	<b>126.796.925</b>	<b>96,92</b>	<b>670</b>	<b>1.389</b>	<b>207,31</b>	<b>Belum Efisien</b>	<b>Belum Efisien</b>
3	Meningkatnya efektivitas pengendalian internal BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	11	8	7	63,64	87,50	222.943.000	47.035.228	21,10	430	394	91,63	Efisien	Belum Efisien
		EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	2	2	1	50,00	50,00	75.381.256	59.858.036	79,41	114	56	49,12	Belum Efisien	Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 3</b>					<b>13</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>61,54</b>	<b>80,00</b>	<b>298.324.256</b>	<b>106.893.264</b>	<b>35,83</b>	<b>544</b>	<b>450</b>	<b>82,72</b>	<b>Efisien</b>	<b>Belum Efisien</b>
4	Meningkatnya kualitas evaluasi pembangunan unit kerja percontohan unit kerja yang memenuhi syarat pengusulan WBK/WBBM	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	2	4	200,00	200,00	107.722.000	106.040.814	98,44	212	0,00	0,00	Efisien	Efisien
		<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 4</b>			<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>107.722.000</b>	<b>106.040.814</b>	<b>98,44</b>	<b>212</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>
5	Meningkatnya transparansi kekayaan Aparatur Sipil Negara	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	2	1	1	50,00	100,00	-	-	0,00	115	39	33,91	Efisien	Efisien
		<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 5</b>			<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>50,00</b>	<b>100,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>115</b>	<b>39</b>	<b>33,91</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>
6	Meningkatnya upaya pencegahan korupsi di lingkungan BPKP	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	7	6	6	85,71	100,00	337.396.000	320.291.119	94,93	533	444,00	83,30	Efisien	Efisien
		<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 6</b>			<b>7</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>85,71</b>	<b>100,00</b>	<b>337.396.000</b>	<b>320.291.119</b>	<b>94,93</b>	<b>533</b>	<b>444,00</b>	<b>83,30</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>
7	Meningkatnya kualitas pengelolaan pengaduan	EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	6	5	5	83,33	100,00	386.389.000	245.516.377	63,54	384	59	15,36	Efisien	Efisien
		<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 7</b>			<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>83,33</b>	<b>100,00</b>	<b>386.389.000</b>	<b>245.516.377</b>	<b>63,54</b>	<b>384</b>	<b>59</b>	<b>15,36</b>	<b>Efisien</b>	<b>Efisien</b>

Sasaran Kegiatan	Sasaran Output Kegiatan	Output Kegiatan								Anggaran			SDM			Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	
		Indikator Output Kegiatan		Satuan	Target 2023	Target s.d Tw III	Realisasi s.d Tw III	Capaian thd Target 2023 (%)	Capaian thd Target Tw (%)	Pagu	Realisasi s.d Tw III	%	Target (OH)	Realisasi (OH) s.d Tw III	%			
1	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
8	Meningkatnya kapabilitas inspektorat	Kapabilitas Inspektorat	EBD.004	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPKP - Hasil Evaluasi Maturitas SPIP BPKP - Pelaksanaan Evaluasi	Laporan	4	4	3	75,00	75,00	32.329.744	32.329.744	100,00	30	181,00	603,33	Belum Efisien	Belum Efisien
			EBD.001	Layanan Manajemen Kinerja Internal - Hasil Pengawasan Internal BPKP - Pelaksanaan Pengawasan	Laporan	3	2	2	66,67	100,00	338.147.000	112.376.158	33,23	1387	200,00	14,42	Efisien	Efisien
<b>Jumlah Sasaran Kegiatan 8</b>					7	6	5	71,43	83,33	370.476.744	144.705.902	39,06	1417	381,00	26,89	Efisien	Efisien	
<b>Total Pengawasan</b>					70	40	60	85,71	150,00	2.379.072.000	1.679.705.525	70,60	5.617	4.447	79,17	Efisien	Efisien	
<b>Bahan dan ATK Pengawasan</b>										142.198.000	68.312.873	48,04						
9	Meningkatnya Kualitas Tata kelola Inspektorat	Meningkatnya Tata Kelola Unit Kerja	EBA.962	Layanan Umum	Layanan	1	1	1	100,00	100,00	197.780.000	133.161.186	67,33				Efisien	
			EBA.994	Layanan Perkantoran	Layanan	1	1	1	100,00	100,00	8.866.814.000	7.108.796.509	80,17				Efisien	
			EBB.951	Layanan Sarana dan	Layanan	1	0	0	100,00	100,00	129.436.000	129.360.000	99,94					
<b>Total Dukungan Manajemen</b>					3	2	2	66,67	100,00	9.194.030.000	7.371.317.695	80,18				Efisien		
<b>Total Anggaran</b>										11.715.300.000	9.119.336.093	77,84						

**GRAND STRATEGY ENABLERS DAN AGENDA PRIORITAS ENABLER PENGAWASAN  
INSPEKTORAT**

NO	KODE GSE	TEMA	TOPIK ENABLERS	KONDISI YANG DIHARAPKAN	KONDISI SAMPAI DENGAN TW III	SIMPULAN STRATEGI	TIMELINE PELAKSANAAN STRATEGI
1	#14	Manajemen Kinerja	Prioritasi penggunaan anggaran	Pemanfaatan anggaran berfokus pada prioritas organisasi: 1. Potret tindak lanjut peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran; 2. Potensi efektivitas dari sisi perencanaan dan penganggaran; 3. Potensi efisiensi dari sisi perencanaan dan penganggaran; 4. Potensi ketercapaian tujuan pada sektor prioritas pengawasan; 5. Permasalahan dalam perencanaan dan penganggaran; 6. Rekomendasi perbaikan	Penganggaran yang disusun oleh unit kerja di BPKP telah melalui pembahasan antara Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola, Biro Keuangan, Inspektorat dan Unit Perencana dan Pengendali pada Kedeputan telah memperhatikan Surat Edaran Sekretaris Utama Nomor PR.01/S-632/SU/01/2023 tanggal 17 April 2023 tentang Usulan Penyesuaian Perencanaan dan Penganggaran Tahun 2023. Berdasarkan surat edaran tersebut alokasi anggaran yang telah tersedia di DIPA unit kerja memprioritaskan anggaran pengawasan untuk pemenuhan target kinerja dan informasi hasil pengawasan yang telah ditetapkan oleh Kepala BPKP. Namun terdapat potensi kegiatan yang tidak efektif sebesar 2.018 PKPT dari total 4.911 PKPT atau sebesar 41,09%. Sedangkan dari segi anggaran, ada potensi inefisiensi terhadap 284 PKPT yang berpotensi tidak terealisasi atau sebesar Rp7.857.935.000,00 dari Rp519.307.762.000,00 total anggaran CH-Pengawasan Tahun 2023.	1. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran. 2. melaksanakan evaluasi pelaksanaan manajemen kinerja dan anggaran.	TW 3, 4
2	APEP non GSE	Manajemen Kinerja	Optimalisasi Pembiayaan (Pinjaman dan Hibah Luar Negeri)	1. Potret kebijakan dan tata kelola pengelolaan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 2. Potret Pinjaman Luar Negeri dan Hibah (analisis tren, portofolio dan pengelolaan risiko); 3. Akuntabilitas pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah, termasuk efisiensi biaya pinjaman; 4. Efektivitas pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah; 5. Ruang optimalisasi pemanfaatan Pinjaman Luar Negeri dan Hibah untuk kebutuhan pengawasan; 6. Identifikasi hambatan; 7. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	1. Inspektorat telah melakukan pendampingan dan QA pelaksanaan STAR AF. 2. berdasarkan surat permintaan PMU STAR AF, inspektorat telah melakukan telaah pelaksanaan perencanaan pembangunan Smart Building STAR AF.	1. Melakukan evaluasi perencanaan dan penganggaran pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang berada di BPKP (STAR AF dan MDTF). (TW3) 2. Melakukan audit kinerja dan keuangan pelaksanaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri yang berada di BPKP (STAR AF dan MDTF). (TW3)	TW 3, 4
3	#3	Manajemen Kinerja	Penjaminan Kualitas atas Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan Pengawasan, dan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP	Perencanaan Pengawasan: 1. Analisis ketepatan dan keselarasan kebijakan perencanaan kegiatan pengawasan antara Pusat dan Perwakilan; 2. Efektivitas pelaksanaan konvergensi perencanaan kegiatan pengawasan; 3. Analisis ketepatan metodologi pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengawasan; 4. Permasalahan dan hambatan perencanaan kegiatan pengawasan; 5. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi  Pelaksanaan Pengawasan: 1. Analisis efektivitas pelaksanaan kegiatan pengawasan dalam mencapai tujuan dan sasaran pengawasan; 2. Analisis ketepatan penggunaan data dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan; 3. Analisis pelaksanaan reviu berjenjang dalam rangka menjaga kualitas/mutu kegiatan pengawasan; 4. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan pengawasan; 5. Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi  Pelaporan Hasil Pengawasan: 1. Analisis mutu hasil pengawasan, meliputi: 1) Ketepatan dan keselarasan penyajian simpulan hasil pengawasan berdasarkan data/informasi yang diuji; 2) Relevansi simpulan terhadap rekomendasi yang diberikan; 3) Rekomendasi yang diberikan bersifat implementatif dalam perbaikan kebijakan; 2. Permasalahan dan hambatan pelaporan hasil pengawasan  Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan BPKP 1. Analisis ketepatan dan keselarasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Pusat dan Perwakilan; 2. Potret pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP (termasuk saldo TPB dan TPTD);	Sampai dgn saat ini, Inspektorat masih dalam proses penyusunan desain pengawasan atas Implementasi MPP. Dalam penyusunan desain pengawasan, Inspektorat berkoordinasi dengan Kedeputan Polhukam PMK utk melihat praktik MPP pada Triwulan II dan III. Dalam penyusunan desain pengawasan, Inspektorat akan memotret implementasi MPP di unit kerja Kedeputan dan Perwakilan. Dircanakan hasil potret awal atas implemetntasi MPP dilaporkan pada Minggu ke 4 Bulan Oktober.	1. Melakukan penyelesaian desain pengawasan yang mengacu pada Perban 2/2023; 2. Melakukan evaluasi/penilaian atas implementasi Perban 2/2023 pada direktorat di masing-masing kedeputan; 3. Menyampaikan hasil evaluasi/penilaian implementasi Perban 2/2023 kepada Kepala BPKP. 4. Melakukan monev pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan BPKP.	TW 3, 4
4	#30 dan #33	Metodologi dan Data	Efektivitas Pengelolaan Risiko	1. Gambaran kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor prioritas pengawasan (identifikasi, analisis, evaluasi, dan penanganan risiko); 2. Analisis efektivitas penyelenggaraan pengelolaan risiko terhadap ketercapaian tujuan sektor prioritas pengawasan (APP dan APPD) (termasuk simpulan potensi ketercapaian target sektor prioritas); 3. Identifikasi hambatan penyelenggaraan pengelolaan risiko; 4. Best practice penyelenggaraan pengelolaan risiko pada sektor prioritas; 5. Identifikasi ruang perbaikan dan saran langkah kebijakan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan pengelolaan risiko pada sektor strategis nasional	Inspektorat telah melakukan reviu dan evaluasi atas penyelenggaraan MR di lingkungan BPKP tahun 2022. Hasilnya Kedeputan (Rendal) belum sepenuhnya secara spesifik mengidentifikasi risiko sektor prioritas pengawasan yang menjadi tanggungjawabnya.	1. Melakukan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil evlu dan evaluasi atas penyelenggaraan MR di lingkungan BPKP tahun 2022. 2. Melakukan pengawasan atas pengelolaan risiko sektor prioritas pengawasan pada unit kerja BPKP.	TW 3, 4

NO	KODE GSE	TEMA	TOPIK ENABLERS	KONDISI YANG DIHARAPKAN	KONDISI SAMPAI DENGAN TW III	SIMPULAN STRATEGI	TIMELINE PELAKSANAAN STRATEGI
5	APEP non GSE	Manajemen Kinerja	Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP	Analisis ketepatan dan keselarasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan di Pusat dan Perwakilan; Potret pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan BPKP (termasuk saldo TPB dan TPTD); Analisis kebermanfaatan rekomendasi hasil pengawasan BPKP; Identifikasi permasalahan dan hambatan pelaksanaan TLHP BPKP Rekomendasi atas perbaikan kebijakan/implementasi	Monitoring dilaksanakan terhadap hasil pengawasan BPKP Tahun 2022 berupa capaian atas Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam Laporan Kinerja BPKP tahun 2022 sebanyak 642 kegiatan senilai Rp117.825.368.995.868,00 yaitu: 1. Kegiatan non-Keinvestigasian 1.1. Dari 505 kegiatan senilai Rp80.744.041.805.499,00, baru 95 kegiatan (18,81%) senilai Rp112.269.355.123,00 (0,14%) yang sudah di-input dalam aplikasi SIMA (MONSIMA) 1.2. Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, sudah ditindaklanjuti sebesar Rp8.225.575.470,33 atau sebesar 0,01% dari nilai kontribusi sebesar Rp80.744.041.805.499,00 atau 7,33% dari nilai yang sudah di-input dalam SIMA (MONSIMA) sebesar Rp112.269.355.123,00 2. Kegiatan Keinvestigasian Dari 337 kegiatan senilai Rp37.081.327.190.369,00, baru 94 kegiatan (27,89%) senilai Rp500.003.969.652,00 (1,35%) yang sudah ditindaklanjuti	melakukan pemantauan triwulanan dan memberikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan proses bisnis penginputan temuan, pemantauan temuan, dan tindak lanjut	TW 3, 4
6	#36	Sumber Daya Manusia	Peningkatan kualitas Pendidikan dan Pelatihan	1. Analisis keselarasan kebijakan pendidikan dan pelatihan pengawasan/dukungan pengawasan dengan lingkungan strategis; 2. Gambaran sebaran kebutuhan pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan; 3. Analisis pemenuhan kebutuhan dan kompetensi tenaga pengajar; 4. Analisis kesesuaian kurikulum pendidikan dan pelatihan dengan lingkungan strategis; 5. Gambaran jumlah dan sebaran lulusan peserta pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan; 6. Analisis kebermanfaatan hasil pendidikan dan pelatihan pengawasan dan dukungan pengawasan terhadap kualitas hasil pengawasan; 7. Permasalahan dan hambatan peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan; 8. Rekomendasi perbaikan kebijakan/implementasi	Pegawasan atas peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan belum dilaksanakan	1. Berkoordinasi dengan Pusdiklatwas dan Biro SDM perihal kebijakan dan implementasi pendidikan pelatihan pengawasan/dukungan pengawasan bagi SDM di BPKP 2. Penyusunan desain pengawasan atas kualitas pendidikan dan pelatihan	TW 3, 4
7	#31	Perlindungan Hukum dan Reputasi	Pengendalian Kecurangan dan Hambatan Pengawasan	1. Kualitas penerapan pengendalian kecurangan oleh Unit Kerja meliputi: - Profil risiko kecurangan tematik; - Profil risiko Hambatan Pengawasan Tematik; 2. Analisis kondisi penanganan pengaduan di BPKP; 3. Rekomendasi kebijakan untuk peningkatan pengendalian kecurangan (lesson learned dari pencegahan, deteksi dan respon kecurangan); 4. Rekomendasi kebijakan untuk penyelesaian hambatan pengawasan	1a) Dari Reviu atas Penilaian Risiko Fraud tahun 2023 pada unit kerja di Lingkungan BPKP diperoleh informasi sebagai berikut: 1) Terdapat 7 unit kerja BPKP yang belum mengidentifikasi risiko fraud. 2) Terdapat 19 pernyataan risiko pada 9 unit kerja yang belum menetapkan konteks sasaran atas risiko fraud yang telah diidentifikasi 3) Pernyataan risiko fraud tidak tepat untuk dimasukkan dalam kategori risiko fraud. 4) Kesalahan dalam memberikan kodifikasi pada risiko kategori fraud. 5) Analisis risiko belum mempertimbangkan existing control. 6) Analisis risiko yang dilakukan tidak tepat dalam menentukan signifikansi level kemungkinan dan dampak sehingga tidak tepat dalam menetapkan signifikansi risiko. 7) Unit kerja belum menetapkan RTP secara lengkap untuk semua risiko prioritas. 8) Empat unit kerja tidak melakukan analisis RCA/akar penyebab risiko kerja atas 4 pernyataan risiko. 9) Sebanyak 6 unit kerja belum merencanakan periode pelaksanaan RTP atas 21 risiko fraud yang menjadi risiko prioritas. 10) Waktu realisasi RTP belum tepat.  Selain itu penyelenggaraan Fraud Risiko Assesment pada APP TW I tahun 2023 juga dilakukan reviu oleh Tim Inspektorat dengan hasil sebagai berikut: 1) Penyelenggaraan FRA APP yang dilakukan oleh BPKP merupakan risiko fraud kegiatan/program dari obyek pemeriksaan, bukan risiko fraud atas pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPKP. 2) Hasil FRA APP yang dilakukan BPKP pada program/kegiatan Obyek Pemeriksaan pada TW I dengan kondisi sebagai berikut: (a) Terdapat 21 pernyataan risiko oleh obyek pemeriksaan yang belum dilengkapi uraian dampak. (b) Terdapat 756 pernyataan risiko dengan skor residual risk meningkat dibandingkan skor inherent risk meskipun telah dinyatakan telah dipasang pengendalian dengan uraian "memadai", terjadi pada 27 unit perwakilan BPKP yang menjadi tim penilai risiko fraud. (c) Terdapat 5 pernyataan risiko yang belum ada pengendalian terpasang, namun	1. Menyusun atensi terkait risiko fraud sejenis ke Biro MKOT selaku lini dua sebagai minimal sebagai bahan pertimbangan dalam pembinaan ke seluruh unit kerja di lingkungan BPKP 2. Menyelenggarakan MOOC untuk meningkatkan pemahaman terkait pengendalian fraud di lingkungan BPKP 3. Menyusun Kebijakan Perlindungan Pelapor 4. Memperluas Identifikasi Hambatan Identifikasi Pengawasan APP pada hampir ke seluruh unit kerja untuk memperoleh informasi yang lebih komprehensif dan alternatif perbaikan.	TW 3, 4